



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Adji Pramono, S.H. dan Nurseta Mustafa, S.H., Advokat yang berkantor di pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Adji Pramono, SH. & Rekan beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 70 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Desember 2023 dan telah didaftar di kepaniteraan PPengadilan Agama Batang dengan no register 1212/KK/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang

Putusan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juli 1977 telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/5/VII/1977 tertanggal 04 Juli 1977, saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BATANG selama 30 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama yang masih satu alamat dengan rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
  - 3.1 ANAK 1 (Pr), NIK : 3325021002790002, lahir di Batang, tanggal 10 Oktober 1979, pendidikan SD, sudah menikah ikut suaminya;
  - 3.2 ANAK 2 (Pr), NIK : 3325020205830001, lahir di Batang, tanggal 02 Mei 1983, pendidikan SD, sudah menikah punya rumah sendiri;
  - 3.3 ANAK 3 (Pr), NIK : 3325021508890002, lahir di Batang, tanggal 15 Agustus 1989, pendidikan SMP, sudah menikah ikut suaminya;
  - 3.4 ANAK 4 (Pr), NIK : 3325021902950002, lahir di Batang, tanggal 19 Februari 1995, pendidikan SMP, sudah menikah ikut suaminya;
  - 3.5 ANAK 5 (LK), NIK : 3325022609000006, lahir di Batang, tanggal 26 September 2006, pendidikan SMP, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, selain masalah ekonomi Tergugat meninggalkan hutang (koperasi maupun perorangan) yang banyak dan sebagian hutang Tergugat tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi selama 2 tahun di rumah bersama, hingga puncaknya terjadi pada

Putusan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 2 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019 saat itu terjadi pertengkaran dan karena Penggugat sudah tidak kuat dengan kelakuan Tergugat, akhirnya Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah bersama (rumah bersama dan rumah orang tua Penggugat masih satu alamat yang sama) dan terhitung sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah;

6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami dan istri, maka Penggugat berkeyakinan perceraian adalah solusi terbaik permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan hukum bagi gugatan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan dan menunjukkan aslinya dari Kartu Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 131/5/VII/1977 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 Juli 1977, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

**SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;  
dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;

---

Putusan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 4 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Juli 1977 di wilayah KUA Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir tinggal dirumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: 1. ANAK 1 (Pr), NIK : 3325021002790002, lahir di Batang, tanggal 10 Oktober 1979, pendidikan SD, sudah menikah, 2. ANAK 2 (Pr), NIK : 3325020205830001, lahir di Batang, tanggal 02 Mei 1983, pendidikan SD, sudah menikah, 3. ANAK 3 (Pr), NIK : 3325021508890002, lahir di Batang, tanggal 15 Agustus 1989, pendidikan SMP, sudah menikah, 4. ANAK 4 (Pr), NIK : 3325021902950002, lahir di Batang, tanggal 19 Februari 1995, pendidikan SMP, sudah menikah, 5. ANAK 5 (LK), NIK : 3325022609000006, lahir di Batang, tanggal 26 September 2006, pendidikan SMP, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, selain masalah ekonomi Tergugat meninggalkan hutang (koperasi maupun perorangan) yang banyak dan sebagian hutang Tergugat tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;

Saksi Kedua;

**SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;  
dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 5 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Juli 1977 di wilayah KUA Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir tinggal dirumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) anak bernama: 1. ANAK 1 (Pr), NIK : 3325021002790002, lahir di Batang, tanggal 10 Oktober 1979, pendidikan SD, sudah menikah, 2. ANAK 2 (Pr), NIK : 3325020205830001, lahir di Batang, tanggal 02 Mei 1983, pendidikan SD, sudah menikah, 3. ANAK 3 (Pr), NIK : 3325021508890002, lahir di Batang, tanggal 15 Agustus 1989, pendidikan SMP, sudah menikah, 4. ANAK 4 (Pr), NIK : 3325021902950002, lahir di Batang, tanggal 19 Februari 1995, pendidikan SMP, sudah menikah, 5. ANAK 5 (LK), NIK : 3325022609000006, lahir di Batang, tanggal 26 September 2006, pendidikan SMP, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, selain masalah ekonomi Tergugat meninggalkan hutang (koperasi maupun perorangan) yang banyak dan sebagian hutang Tergugat tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Putusan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 6 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai Kuasa Penggugat, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Kuasa Penggugat dapat mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memilih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Juli 1977, namun sejak bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, selain masalah ekonomi Tergugat meninggalkan hutang (koperasi maupun perorangan) yang banyak dan sebagian hutang Tergugat tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat; yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan Desember 2019, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Putusan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 7 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana relaas panggilan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu;

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, SAKSI 1 dan SAKSI 2 masing-masing sebagai tetangga Penggugat dan Keponakan Penggugat Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (pasal 1911 BW) di persidangan sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak Sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis akibat Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, selain masalah ekonomi Tergugat meninggalkan hutang (koperasi maupun perorangan) yang banyak dan sebagian hutang Tergugat tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat; yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan Desember 2019, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 1977 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BATANG dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama 1. Kuswiyanti Binti Kamsari (Pr), NIK : 3325021002790002, lahir di Batang, tanggal 10 Oktober 1979, pendidikan SD, sudah menikah, 2. Teguh Supriyanto Bin Kamsari (Pr), NIK : 3325020205830001, lahir di Batang, tanggal 02 Mei 1983, pendidikan SD, sudah menikah, 3. Astri Wijayanti Binti Kamsari (Pr), NIK : 3325021508890002, lahir di Batang, tanggal 15 Agustus 1989, pendidikan SMP, sudah menikah, 4. Rizqi Setyaningsih Binti Kamsari (Pr), NIK : 3325021902950002, lahir di Batang, tanggal 19 Februari 1995, pendidikan SMP, sudah menikah, 5. Tegar Irianto Bin Kamsari (LK), NIK :

Putusan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 10 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3325022609000006, lahir di Batang, tanggal 26 September 2006, pendidikan SMP, dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Sejak bulan Desember 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, selain masalah ekonomi Tergugat meninggalkan hutang (koperasi maupun perorangan) yang banyak dan sebagian hutang Tergugat tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat;;

4. Bahwa kurang lebih 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa tidak ada manfaatnya, karena tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah, baik secara filosofis, sosiologis maupun psikologis serta dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh

Putusan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 11 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

## فَإِنْ اِخْتَلَفَ بِأَنْ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya;

*"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".*

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 huruf c tidak pula melanggar ketentuan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. *"Ayyumaa imraatin saalat zaujahaa al-thalaaqa min ghairi ba'sin faharaamun 'alaihi raaihatu al jannati"* dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Mura'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام  
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق  
له

Artinya : *"Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya "*.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua, SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. dan M. ZUBAIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota II,

M. ZUBAIDI, S.H.

Putusan nomor 1801/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 14 dari 15



EKO KUSDIYANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan/Pemberitahuan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).